

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

A. Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, 2004.

Ali Mudhofir, *Kamus Filsafat Nilai*, Yayasan Kertagama, 2014.

Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, 2000.

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII PRESS, 2013.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, 2005.

Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.

Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, 2001.

Elza Faiz dkk, *Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang)*, Sekjend Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.

Fahri Hamzah, *Demokrasi Transisi Korupsi (Orkresta Pemberantasan Korupsi)*, Yayasan Faham Indonesia, 2012.

I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi (Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Setara Press (Kelompok Penerbit Insrans), 2012.

Imam Anshory Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan*

Dalam UUD 1945, FH UII PRESS, 2005.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, 2010

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, 2011.

_____, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, 2012.

_____, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, UII Press, 2007.

_____, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII PRESS, 2014.

_____, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusamedia, 2011.

Panduan Eksaminasi Publik, Indonesia Corruption Watch, 2011.

Ridwan.H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2013.

Robert A Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis (Antara Otonomi dan Kontrol)*,
CV. Rajawali, 1985.

Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara, Sekjen Komisi
Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, 2008.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, 2015.

Wim Voermans, *Komisi Yudisial di beberapa Negara Uni Eropa*, The Asian
Foundation, Usaid, LeIP, 2002.

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, Kaukaba Dipantara, 2015.

Jurnal dan Karya Ilmiah :

Asrul Ibrahim Nur, “Problematika Perpu tentang Mahkamah Konstitusi”,
artikel Pada *Jurnal Update Indonesia*, edisi no. 4 Vol. VIII, 2013

Gusliana. H.B, “Komisi Yudisial Kini dan Mendatang”, artikel pada *Jurnal
Equality*, edisi no. 2 Vol. 12, 2007

Taufiqurrohman Syahuri, “Problematika Tugas Konstitusional Komisi
Yudisial”, artikel pada *Jurnal Konstitusi*, edisi no. 4 Vol. 7, 2010

Umi Iliyana, “Pasang Surut Komisi Yudisial : Kreasi, Resistensi dan
Restorasi”, artikel pada *Jurnal Konstitusi*, edisi no. 3 Vol. 8, 2011

Wahyu Wiriadinata, “Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia”,
artikel pada *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44, No.
4, 2013

Zihan Syahayani, *Pembaharuan Hukum dalam Sistem Seleksi dan
Pengawasan Hakim Konstitusi*, artikel ilmiah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas
Hukum, 2014

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Data Elektronik dan Media Cetak:

<http://www.antaraneews.com/berita/400221/sebuah-harga-mati-pengawasan-hakim-konstitusi>, dikutip pada tanggal 3 September 2016 Pukul.03.04 WIB.

<https://m.tempoco.com/read/news/2015/10/11/063708527/refly-harun-pertanyakan-putusan-mk-soal-komisi-yudisial>, dikutip tanggal 2 September 2016, Pukul 04.04 WIB.

<http://news.detik.com/kolom/3283039/13-tahun-mk-dan-mengakhiri-rezim-bongkar-pasang-pansel-hakim-konstitusi>, dikutip Pada 18 November 2016 Pukul 17.22 WIB

<http://www.antaraneews.com/berita/399186/survei-kepercayaan-publik-atas-mk-28-persen>, dikutip Pada 19 November 2016 Pukul 18.47 WIB

<https://news.detik.com/berita/3229428/soal-absennya-nurhadi-di-pembahasan-anggaran-ma-ini-kata-banggar-dpr>, dikutip Pada 25 November 2016 Pukul 12.35 WIB

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/21/14450501/syafii.maarif.sebut.permainan.uang.rusak.peradilan.tetapi>, dikutip Pada 21 November 2016 Pukul 13.19

<http://news.okezone.com/read/2013/10/30/339/889546/mk-bentuk-dewan-etik>

, dikutip Pada 19 November 2016 Pukul 00.49

<http://www.antaraneews.com/berita/400221/sebuah-harga-mati-pengawasan->

[hakim-konstitusi](#), dikutip pada tanggal 3 September 2016

Pukul.03.04 WIB

Kompas, Rabu 19 Oktober 2016, hlm. 1

<http://www.komisiyudisial.go.id/peraturan.html>, dikutip Pada 25 November

2016 Pukul 17.49 WIB.

<http://www.komisiyudisial.go.id/files/Laporan-PLM-April-2016.pdf>, dikutip

Pada 25 November 2016 Pukul 16.39 WIB

<http://www.komisiyudisial.go.id/berita-54525-kewenangan-etik-adalah->

[kewenangan-besar-ky.html](#), dikutip Pada 21 November Pukul 13.51

WIB

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/resume/res>

[ume_perkara_1431_Perkara%20No%2043.pdf](#), dikutip Pada 20

November Pukul 06.21 WIB

<http://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11->

[artikelkompas/484-selamatkan-jalan-hakim-mk.html](#), dikutip Pada

18 November 2016 Pukul 22.43 WIB

<http://leip.or.id/analisis-persoalan-seleksi-hakim-dalam-putusan-mk-distribusi-atau-sentralisasi/>, dikutip Pada 20 November 2016 Pukul 05.54

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561779b5d4d5a/analisis-persoalan-seleksi-hakim-dalam-putusan-mk--distribusi-atau-sentralisasi-broleh--dian-rositawati->, dikutip Pada 20 November 2016 Pukul 06.05 WIB

<http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5618bbea8b735/putusan-ikahi-bakal-diadukan-ke-dewan-etik>, dikutip Pada 21 November Pukul 13.40 WIB.

<http://www.antikorupsi.org/id/content/kpk-harus-usut-dugaan-penyimpangan-anggaran-di-ma>, dikutip Pada 25 November 2016 Pukul 03.09 WIB

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/333/checks-and-balances-dan-judicial-review-dalam-legislasi-di-indonesia/>, dikutip Pada 21 November 2016 Pukul 03.33 WIB

<http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/images/pedoman%20evaluasi%20revisi%2030%20juni.pdf>, dikutip Pada 26 November 2016 Pukul 15.53

<http://mpr.go.id/posts/perlu-model-hubungan-antara-ky-dengan-ma-dan-mk>, dikutip Pada 25 November 2016 Pukul 17.55 WIB

<https://padmimonang.wordpress.com/2012/10/24/desain-konstitusional-komisi-yudisial-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/>, dikutip Pada 20 November 2016 Pukul 01.52

<http://perilakuorganisasi.com/max-weber-1864-1920.html>, dikutip Pada 25

November 2016 Pukul 12.11 WIB

[https://padmimonang.wordpress.com/2012/10/24/desain-konstitusional-](https://padmimonang.wordpress.com/2012/10/24/desain-konstitusional-komisi-yudisial-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/)

[komisi-yudisial-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/](https://padmimonang.wordpress.com/2012/10/24/desain-konstitusional-komisi-yudisial-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia/), dikutip

Pada 20 November 2016 Pukul 01.52 WIB

[https://wiwinsuw4ndi.wordpress.com/2014/02/15/legal-anotasi-putusan-](https://wiwinsuw4ndi.wordpress.com/2014/02/15/legal-anotasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-1-2puu-xii2014-tentang-pengujian-undang-undang-nomor-4-tahun-2014-tentang-perppu-no-12013-tentang-perubahan-kedua-atas-uu-no-24-tahun-2003-tentang-mk/)

[mahkamah-konstitusi-nomor-1-2puu-xii2014-tentang-pengujian-](https://wiwinsuw4ndi.wordpress.com/2014/02/15/legal-anotasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-1-2puu-xii2014-tentang-pengujian-undang-undang-nomor-4-tahun-2014-tentang-perppu-no-12013-tentang-perubahan-kedua-atas-uu-no-24-tahun-2003-tentang-mk/)

[undang-undang-nomor-4-tahun-2014-tentang-perppu-no-12013-](https://wiwinsuw4ndi.wordpress.com/2014/02/15/legal-anotasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-1-2puu-xii2014-tentang-pengujian-undang-undang-nomor-4-tahun-2014-tentang-perppu-no-12013-tentang-perubahan-kedua-atas-uu-no-24-tahun-2003-tentang-mk/)

[tentang-perubahan-kedua-atas-uu-no-24-tahun-2003-tentang-mk/](https://wiwinsuw4ndi.wordpress.com/2014/02/15/legal-anotasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-1-2puu-xii2014-tentang-pengujian-undang-undang-nomor-4-tahun-2014-tentang-perppu-no-12013-tentang-perubahan-kedua-atas-uu-no-24-tahun-2003-tentang-mk/),

dikutip Pada 19 November 2016 Pukul 17.18 WIB

